

LAPORAN TESIS

**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN DALAM
PEMENUHAN KEPESERTAAN WAJIB BPJS KESEHATAN PADA
PT. SUKANDA DJAYA SEMARANG GUNA MENINGKATKAN
HAK PELAYANAN KESEHATAN KARYAWAN**



MUTAMIMATURROFIQOH

NIM : 22.C2.0068

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Konsentrasi Hukum Kesehatan

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2024

ABSTRAK

Hak mendapatkan pelayanan kesehatan merupakan hak konstitusional bagi warga negara dalam hal ini karyawan, tingginya beban kerja di perusahaan dapat mengakibatkan terganggunya kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan pelaksanaan tanggung jawab perusahaan dalam pemenuhan kepesertaan wajib BPJS Kesehatan pada PT. Sukanda Djaya guna meningkatkan hak pelayanan kesehatan, yang meliputi pendataan, pendaftaran kepesertaan, iuran wajib dan manfaat yang diterima oleh karyawan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis dengan metode pendekatan analisis deskriptif yaitu dengan mengumpulkan data melalui studi lapangan berupa wawancara langsung dan mengisi *google form* kepada subjek yang diteliti serta studi pustaka kemudian di analisis secara kualitatif menggunakan teori, asas hukum serta peraturan perundangan yang berkaitan dengan penelitian.

Bahwa pengaturan tanggung jawab dalam pemenuhan kepesertaan wajib BPJS kesehatan bersifat wajib untuk karyawan tetap, PKWTT dan *outsourcing* dari *level worker* sampai *level managerial* tanpa syarat telah sesuai dengan Deklarasi HAM, UU 39/1999 Pasal 1 ayat (1), UUD 1945 Pasal 28H ayat (1), Pasal 34 ayat (2) dan (3), UU SJSN, Perpres tentang JKN sedangkan pelaksanaan pemenuhan kepesertaan BPJS Kesehatan dengan melakukan pendataan, pendaftaran telah sesuai dengan UU BPJS serta tertuang dalam Pedoman Prilaku dan Etika Bisnis Perusahaan, dimana belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan hukum jika dilihat dari iuran yang dipotong oleh perusahaan, besaran iurana apabila jumlah tanggungan karyawan lebih dari lima orang sehingga perlu dibuatkan aturan yang lebih jelas, penambahan fasilitas pelayanan kesehatan lain tidak terbatas pada divisi logistik tetapi sales dan finance sehubungan dengan tingginya beban kerja sehingga manfaat pelayanan serta fasilitas kesehatan dapat dirasakan oleh seluruh karyawan perusahaan.

Kata Kunci : Kepesertaan, Pelayanan Kesehatan, Jaminan Kesehatan

ABSTRACT

The right to obtain health services is a constitutional right for citizens in this case employees, the high workload in the company can result in disruption of health. This study aims to determine the regulation and implementation of corporate responsibility in fulfilling mandatory BPJS Health membership at PT Sukanda Djaya in order to improve health service rights, which include data collection, membership registration, mandatory contributions and benefits received by employees.

This research uses a type of sociological juridical research with a descriptive analysis approach method, namely by collecting data through field studies in the form of direct interviews and filling out google forms to the subjects studied and literature studies then analyzed qualitatively using theories, legal principles and laws and regulations related to the research.

That the regulation of responsibility in the fulfillment of compulsory BPJS health membership is mandatory for permanent employees, PKWTT and outsourcing from the worker level to the managerial level without conditions in accordance with the Declaration of Human Rights, Law 39/1999 Article 1 paragraph (1), 1945 Constitution Article 28H paragraph (1), Article 34 paragraph (2) and (3), SJSN Law, Perpres on JKN while the implementation of the fulfillment of BPJS Health membership by collecting data, registration is in accordance with the BPJS Law and is contained in the Company's Code of Conduct and Business Ethics, Where it is not fully in accordance with legal regulations when viewed from the dues deducted by the company, the amount of dues if the number of employee dependents is more than five people so that clearer rules need to be made, the addition of other health service facilities is not limited to the logistics division but sales and finance in connection with the high workload so that the benefits of services and health facilities can be felt by all company employees.

Keywords: Membership, Health Services, Health Insurance